



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 100/005/KSB/BAGPEM/XI/2022 dan Nomor 170/06/DPRD/XI/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dimana atas dasar kesepakatan bersama tersebut telah ditetapkan Judul Rancangan Peraturan Daerah untuk Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Propemperda sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 November 2022

DPRD KOTA BANJARMASIN

KETUA,



HARRY WIJAYA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Judul/Tema Raperda	Inisiatif Pengajuan
1	Raperda Tentang Kerjasama Daerah	DPRD
2	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi	DPRD
3	Raperda Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual	DPRD
4	Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	DPRD
5	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ketenagakerjaan	DPRD
6	Raperda Tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	DPRD
7	Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor	DPRD
8	Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPRD
9	Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPRD
10	Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasin (Perseroda)	KDH
11	Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda)	KDH
12	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar “Baiman” Kota Banjarmasin	KDH
13	Raperda Tentang Penyelenggaraan Transportasi	KDH
14	Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	KDH
15	Raperda Tentang Kepemudaan	KDH
16	Raperda Tentang Cagar Budaya	KDH
17	Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industrial	KDH
18	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang	KDH

	Penyelenggaraan Gudang	
19	Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	KDH
20	Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan dan Pertamanan	KDH
21	Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman	KDH
22	Raperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Mediasi	KDH
23	Raperda Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama	KDH
24	Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022	KDH
25	Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	KDH
26	Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	KDH



DPRD KOTA BANJARMASIN
KETUA,

HARRY WIJAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DILANJUTKAN
PEMBAHASANNYA PADA TAHUN 2023

No.	Judul / Tema Raperda
1	Izin Mendirikan Bangunan
2	Pengembangan Ekonomi Kreatif
3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame
4	Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5	Peningkatan Budaya Literasi
6	Fasilitasi Pesantren
7	Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia



DPRD KOTA BANJARMASIN
KETUA,

HARRY WIJAYA